PENYELENGGARAAN – KESEJAHTERAAN SOSIAL

2024

PERDA KOTA BEKASI NO. 14, LD 2024/NO. 14, LL SETDA KOTA BEKASI : 26 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

ABSTRAK: - Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang optimal di daerah perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan yang diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.9 Tahun 1996; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peran Masyarakat; Pendaftaran, Perizinan dan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial; Kerjasama dan Kemitraan; Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Yang Berasal Dari Masyarakat; Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan, Uang Atau Barang dan Undian; Pembinaan dan Pengendalian.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024.
- Semua ketentuan yang berkaitan sebelum diundangkannya Perda ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.